

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIH DIKOTA PADANG PADA PILKADA TAHUN 2018

MORY YANDIKA

NPP 30.0197

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Prodi Politik Indonesia Terapan

Email. moryyandika27@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Heru Rochmansjah, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Elections at the regional level are carried out by the General Elections Commission at the district or city level. Especially for the 2018 Pilkada, there was an increase in voter participation. In the 2013 Pilkada, voter participation was only 57.70% but experienced a significant increase in the 2018 Pilkada, namely 64.05%. **Purpose:** This study aims to describe the shape of the Padang City Election Commission's strategy in increasing the level of voter participation in the 2018 Pilkada. By using the concepts of strategy, political communication and political socialization. **Methods:** This research is a qualitative research with a case study type. Data collection techniques in-depth interviews and documentation techniques. In selecting research informants, researchers used a purposive sampling technique. The data obtained were analyzed by ethical and emic analysis. **Results/Findings:** The participation of the electorate in the election of the city of Padang there is a positive thing that there is an increase specifically for the General Election Commission for the City of Padang, an increase in voter participation occurred in the 2018 Pilkada. Where in the 2013 Pilkada voter participation was only 57.70% of the total list Registered permanent voters experienced a significant increase in the 2018 Pilkada, namely 64.05%. This means that the comparison of voter participation data in the two regional elections has a difference in the increase of 6.35%. The general election commission's strategy has a very impact on increasing political participation like what is done by the Padang city KPU team work so that each program can be achieved with satisfactory results such as formulation and long-term goals, communication with related parties, and streamlining election smart house activities. **Conclusion:** the strategy implemented by the general election commission in increasing the participation of voters in the city of Padang in the 2018 regional elections is optimal, it only needs some improvements in a number of sub-dimensional indicators.

Keywords: Strategy, Voter Participation, Regional Head Elections (Pilkada), General Election Commission (KPU)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten atau kota. Khusus untuk Pilkada 2018, terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Di mana pada Pilkada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,70% namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada 2018 yaitu 64,05%. **Tujuan** : penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan tingkat Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018. Dengan menggunakan Konsep Strategi, Komunikasi Politik dan Sosialisasi Politik. **Metode** : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa etik dan emik. **Hasil/Temuan** : Partisipasi masyarakat pemilih pada pilkada kota padang terdapat hal positif yang terdapat peningkatan yang Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, peningkatan partisipasi pemilih terjadi pada Pilkada tahun 2018. Dimana pada Pilkada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,70% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada 2018 yaitu 64,05%. Artinya perbandingan data partisipasi pemilih dalam dua Pilkada tersebut terdapat selisih peningkatan sebesar 6.35%. Strategi komisi pemilihan umum sangat berdampak dalam meningkatkan partisipasi politik seperti apa yang di lakukan oleh team work KPU kota Padang agar setiap program dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan seperti formulasi dan sasaran jangka panjang ,komunikasi dengan pihak terkait, dan mengefektifkan kegiatan rumah pintar pemilu. **Kesimpulan** : strategi yang diterapkan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih di kota padang pada pilkada tahun 2018 sudah terbilang optimal hanya perlu beberapa perbaikan pada beberapa sub indikator dimensi.

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), kemudian dimanifestasikan dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.(Dwi haryono.2018,hlm 68).

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. *Pertama* peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap partai politik (Parpol). Parpol dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. *Kedua* golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. golput lebih banyak karena persoalan administratif seperti tidak terdaftar, atau jumlah suara

yang tidak sah. golput yang dimaksud disini yaitu : golput ideologis dan administratif. golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis. golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Fenomena golput ini tidak hanya terjadi dalam pemilu saja, namun juga terjadi pada tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tahapan demokrasi Bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen undang-undang Tahun 1945. Undang-undang ini, pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Indonesia dengan keragaman bangsa, menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Di beberapa daerah, KPU telah banyak melakukan strategi dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai macam upaya dilakukan oleh KPU dengan pendekatan yang berbeda-beda disetiap daerah yang dikenal dengan istilah strategi. (Rahmad Rinjani. 2014, hlm. 3470)

Tabel 1

Perbedaan Strategi KPU dalam meningkatkan oartisipasi pemilih pada pilkada

No	KPU	Strategi
1.	Kota Samarinda	1. Penguatan Kelembagaan 2. Sosialisasi Politik 3. Pendidikan Pemilih Pemula
2.	Kota Pekanbaru	1. Pengenalan Sasaran 2. Pemilihan Media
3.	Kabupaten Malang	1. Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang 2. Tahap pemilihan tindakan 3. Tahap pengalokasian sumber daya

Sumber: Hasil olahan Peneliti dari Dwi Haryono, Rafika Julia dan Petrus Gleko dkk

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka dapat disimpulkan dua hal, yakni: *Pertama*, adanya penggunaan strategi oleh KPU di level daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. *Kedua*, adanya perbedaan strategi yang diterapkan oleh KPU daerah-daerah tersebut dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. Fenomena meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pilkada ini, secara khususnya juga terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Sumatera Barat dengan berkoordinasi bersama 4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota, yaitu: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto. Peningkatan angka partisipasi memilih masyarakat dari Pilkada serentak yang digelar di 4 Kota Sumatera Barat Tahun 2013, dengan Pilkada serentak yang digelar di 4 Kota Sumatera Barat Tahun 2018. Hal ini sebagaimana pernyataan dari salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Nova Indra, yang mengatakan:

Partisipasi pemilih pada empat Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2018 ini meningkat walau jumlah pasangan calon berkurang pada Pilkada Tahun 2013 lalu. Artinya apa, walau pasangan calon berkurang pada Pilkada tahun ini, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya atau datang ke TPS tetap tinggi...” (Bukittinggi Post.2019) Berdasarkan keterangan dari Nova Indra selaku Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat di atas, diketahui bahwa angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2018 cenderung meningkat dari Pilkada serentak tahun 2013.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. *Pertama* peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap partai politik (Parpol). Parpol dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. *Kedua* golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. golput lebih banyak karena persoalan administratif seperti tidak terdaftar, atau jumlah suara yang tidak sah. golput yang dimaksud disini yaitu : golput ideologis dan administratif. golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis. golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks partisipasi Masyarakat pada saat Pemilu. Penelitian pertama dilakukan oleh Nilam Sapma dan Nora Eka Putri (2019) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilukada Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sudah terlaksana secara optimal, walaupun masih adanya ditemukan kendala dalam melaksanakan strategi komunikasi dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi yang telah dibuat oleh KPU Kota Padang.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryono (2018) dengan judul Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari (2017) dengan judul Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. Hasil penelitian ini adalah: 1. Strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2015 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Kedua tahap pemilihan tindakan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju. Ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia ad hoc. 2. Kendala yang dialami oleh KPU yaitu berupa minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, serta jumlah personil KPU yang terbatas

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini terdapat pada analisis teori dan locusnya . Penelitian pertama menggunakan Kualitatif/ Teori Komunikasi (Nilam Sapma dan Nora Eka Putri 2019). Selanjutnya untuk penelitian kedua menggunakan Teori Konsep Analisis Data Interaktif dengan locus Samarinda (Dwi Haryono, 2018). Kemudian untuk penelitian yang ketiga menggunakan Teori konsep

formulasi kebijakan dan pilihan tindakan kebijakan dengan locus Kabupaten Malang (Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari, 2017)

1.5 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan tingkat Partisipasi Masyarakat pemilih pada Pilkada tahun 2018.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis hasil penelitian menggunakan teori konsep Strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015: 64). Dengan dimensi Formulasi dan sasaran jangka panjang, Pemilihan tindakan, dan Alokasi sumber daya. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai alat untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian atau instrument penelitian. Pada penelitian ini, peneliti turun kelapangan sebagai pengumpul data atau sebagai instrument penelitian. Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula. Dengan informan yakni Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Koordinator Divisi Perencanaan dan Data. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan menggunakan studi dokumentasi. Analisis data ini berbentuk analisis etik dan emik, proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih

Diberlakukannya UU mengenai Pemilu dengan menggabungkan pemilihan wakil rakyat di legislatif dengan eksekutif yang akan duduk di pemerintahan oleh pembuat UU. Pemilu diselenggarakan oleh KPU pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, Bawaslu pusat/provinsi/kabupaten/kota, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dengan segala tugas, wewenang, dan kewajiban yang sudah diatur untuk masing-masing lembaga. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU merupakan lembaga penyelenggara utama, karena semua proses Pemilu di titik beratkan kepada KPU yang sudah tersusun dalam UU Pemilu dan PKPU.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, adil, dan mandiri. Dapat peneliti pahami bahwa KPU itu berada di seluruh Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian melaksanakan tugas dan kewenangannya itu secara berkesinambungan, dalam artian tidak ada pekerjaan KPU yang terputus. KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bebas dari intervensi, campur tangan, kemudian pengaruh pihak lain yang menjadi pemangku kepentingan Pemilu.

3.1.1 Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dalam proses pengambilan data lapangan peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris KPU Kota Padang bapak Ir Lucky DIP. M.Si tanggal 13 Februari 2023. Terkait pendataan data

pemilih KPU memiliki strategi sesuai yang disampaikan dengan sekretaris KPU Kota Padang. Mengenai data pemilih kita melakukan rapat di plenokan diperintahkan.

“...segala bentuk keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mesti melewati rapat pleno di Internal KPU. Gunanya untuk membicarakan apa saja yang menjadi program-program yang akan dilaksanakan. Apa target dan sasaran kemudian juga rencana-rencana strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Biasanya rapat ini cukup alot, karena akan menjadi acuan terhadap apa yang dilakukan.”

Pernyataan Ketua dan Sekretaris KPU Kota Padang tersebut peneliti memaknai bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Padang adalah mempersiapkan *Master Plan* melalui rapat-rapat yang ada di KPU Kota Padang untuk menentukan program yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan langkah-langkah strategi yang dikemukakan oleh Chandler, bahwa melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3.1.2 Pemilihan Tindakan

Dalam wawancara lanjutan, Sekretaris KPU Kota Padang melanjutkan bahwa, setiap kegiatan yang telah direncanakan menjadi tanggung jawab sekretariat untuk memfasilitasi keputusan ketua dan anggota KPU dibawah komando Sekretaris.

“...kemudian seorang sekretaris menyiapkan hal hal yang berhubungan dengan tugas di lapangan. Terkait keputusan dan kebijakan dalam strategi peningkatan partisipasi itu wewenang 5 komisioner. Tugas kami selaku orang sekretariat itu hanya melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Langkah selanjutnya tugas kita membagi tugas kepada setiap kabag kasubag di sekretariat.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kota Padang selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Chandler bahwa Untuk mencapai visi, misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya. Tindakan yang diambil oleh Sekretariat KPU Kota Padang dibawah komando Sekretaris merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan partisipasi atas setiap program yang telah direncanakan. Sekretariat KPU Kota Padang, melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya disekretariat yang juga terbagi kedalam beberapa Sub Bagian.

3.1.3 Mempersiapkan Sumber Daya

KPU dalam bekerja di Internal serta kekompakan di internal pengurus sekretariat. Ini sesuai yang disampaikan oleh sekretaris KPU Kota Padang yang peneliti mewawancarai di sekretariat KPU Kota Padang sebagai berikut.

“.....Dalam hal peningkatan partisipasi, kunci utama yang kami lakukan yaitunya penguatan di internal sekretariat. Kekompakan tim agar setiap program dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Kekompakan tim sangat berpengaruh besar dalam setiap melakukan program. Jika tim tidak kompak akan terjadi gesekan di dalam tim”

Strategi KPU Kota Padang dalam memeperkuat internal adalah bagian dari mempersiapkan Sumberdaya dimana Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang sudah ditetapkan.

Upaya ini peneliti pandang adalah langkah-langkah strategi yang dikataka oleh Chandler. Bahwa narasumber mengatakan menjaga soliditas dan kekompakan adalah penujung utama

dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sehingga segala program yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sumberdaya yang telah dipersiapkan.

3.2 Komunikasi KPU Kota Padang dengan Pihak Terkait

a. Komunikasi dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga yang terkait. Data pemilih dimulai dari Dinas Pencatatan Sipil kemudian dikirim ke Kemendagri dan diserahkan kepada KPU RI hingga sampai ke KPU Kabupaten Kota, seperti yang disampaikan oleh Lucky Dharma Yuli Putra, M. Si, Sekretaris KPU Kota Padang.

“...Sebenarnya untuk lebih jelas bukan hanya dengan media saja dengan mitra kerja yang terkait kita juga bekerja sama dengan capil. Data awal dari mereka dapat itu, dari mereka kemudian dikirim ke pusat dan capil pusat menurunkan ke KPU RI barulah setelah hasil sinkronisasi hasil KPU RI barulah data Padang itu balik ke sekretariat kota Padang.”

Keterlibatan berbagai elemen dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Padang ini adalah bentuk dari konsep komunikasi politik yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo mengartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

b. Diskusi *Lapau*, Media Internet, dan Media Massa

KPU Kota Padang mengadakan diskusi *lapau*, dalam diskusi *lapau* ini KPU Kota Padang mengadakan beberapa diskusi dengan masyarakat yang berada di *lapau* tersebut mengenai Pemilu. KPU Kota Padang juga menggunakan media berbasis internet untuk mensosialisasikan tentang pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati. “...Dalam hal ini KPU Kota Padang menggunakan berbagai macam sarana media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter yang pada umumnya sangat mudah oleh masyarakat untuk mengaksesnya. KPU Kota Padang menggunakan media massa *advertising* untuk mensosialisasikan pemilu ke masyarakat. KPU Kota Padang menggunakan berbagai macam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan blog KPU Kota Padang.”

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang merupakan bagian dari komunikasi politik, dimana KPU Kota Padang sebagai Komunikator menyampaikan pesan-pesan politik kepada Masyarakat sebagai Komunikan untuk dapat memilih pada Pilkada Tahun 2018.

3.3 Sosialisasi KPU Kota Padang

a. Keterlibatan Pers Dalam Sosialisasi Pilkada 2018

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih di wilayah Kota Padang. Pesan-pesan politik disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melalui berbagai kegiatan dan media. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang.

“...media merupakan mitra kerja kita yang dimana berperan sebagai perpanjangan tangan kami, kalau tidak di dukung dengan media, bagaimana kami bekerja kan masyarakat tidak akan

tahu. Dan itu di bawah divisi teknis, baik itu mengelola kawan-kawan wartawan baik itu media online media cetak maupun media elektronik. Tetap komunikasi itu tetap kita jaga, jadi ketika kita butuh mereka tinggal di telepon mereka datang dan semuanya bekerja sesuai tugas masing-masing. Ketika kita bisa menjaga hubungan baik dengan mereka.”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang dapat dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang berupaya betul untuk menyampaikan pesan-pesan politik, kenapa memilih pemimpin itu penting. Peningkatan partisipasi adalah berkat kerja sama yang dilakukan KPU Kota Padang dengan seluruh media. Kinerja media dilihat dari bagaimana dia menyampaikan pesan politik kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilihan. Oleh karena itu KPU Kota Padang melakukan kerjasama dengan media online bahkan media cetak dan pegiat pegiat media untuk menyampaikan pesan - pesan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Kondisi ini membuat masyarakat terdorong atas penggunaan hak nya dalam hari pemilihan nanti.

b. Mengefektifkan Kegiatan Rumah Pintar Pemilu

Dalam meningkatkan partisipasi ini KPU Kota Padang membuat program yang bernama pendidikan memilih/Pendidikan Demokrasi. Program selanjutnya yang dibuat oleh KPU Kota Padang untuk memberikan edukasi mengenai Pemilu adalah Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu adalah program kegiatan KPU Kota Padang dalam menanamkan pentingnya berdemokrasi dan menggunakan hak pilihnya mencakup semua segmen yang ada di masyarakat agar masyarakat tersebut sadar akan nilai-nilai demokrasi. Kegiatan Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Padang mengundang segala segmen masyarakat dalam melakukan sosialisasi, selain sejalan dengan KPU Goes to School, Rumah Pintar Pemilu ini juga mengadakan diskusi *lapau*.

Hal ini disampaikan oleh Yusrin Trinanda, SIP Koordinator Divisi Perencanaan dan Data.

“...rumah pintar pemilu adalah salah satu upaya kita menciptakan ruang informasi berkaitan dengan kepemiluan, sudah banyak yang berkunjung mulai dari pelajar, Masyarakat dan pengurus partai untuk mencari tahu tentang kepemiluan. Rumah pintar pemilu kami jadikan pilar untuk media sosialiasi dalam pilkada 2018”

c. Masifnya Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Padang Terhadap Generasi Milenial.

Komisi Pemilihan Umum memahami potensi pemilih pemula yang tumbuh sekitar 16.077 pemilih. KPU Kota Padang melakukan upaya sosialisasi massif kepada pemilih pemula atau generasi milenial. Hal ini seperti disampaikan oleh Lucky Dharma Yuli Putra, M. Si, Sekretaris KPU Kota Padang:

“...Ada beberapa program yang kami rumuskan di KPU Kota Padang, pertama KPU *Go to Campus* program ini kami tujukkan untuk seluruh kampus di kota Padang diantaranya ada Unand, UIN Imam Bonjol, Universitas Negeri Padang, Universitas Eka Sakti, Universitas Taman Siswa, dan Universitas Putra Indonesia. Kegiatan ini kami lakukan dalam bentuk webinar dan MOU dengan jurusan yang langsung berkaitan dengan dunia kepemiluan”

Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang adalah bentuk sosialisasi politik dengan kekhususan target sosialisasi. KPU Kota Padang menyadari bahwa salah satu

potensi untuk meningkatkan partisipasi adalah dengan mendekati diri dengan Pemilih Pemula. Melalui *Road to Campus* dan *Goes to School* adalah kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Almond dan Verba. Secara luas sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, peningkatan partisipasi pemilih terjadi pada Pilkada tahun 2018. Dimana pada Pilkada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,70% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada 2018 yaitu 64,05%. Artinya perbandingan data partisipasi pemilih dalam dua Pilkada tersebut terdapat selisih peningkatan sebesar 6,35%. angka 6,35% tersebut merupakan angka yang sangat besar untuk sebuah daerah dengan Daftar Pemilih Tetap diatas 500 ribu pemilih. Dengan peningkatan tersebut, menarik perhatian peneliti terhadap faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan partisipasi Pilkada Kota Padang Tahun 2018.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti yang menjelaskan mengenai strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih di kota padang pada pilkada tahun 2018.

A. Partisipasi Masyarakat Pemilih Pada Pilkada Kota Padang.

Partisipasi masyarakat pemilih pada pilkada kota padang terdapat hal positif yang terdapat peningkatan yang Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, peningkatan partisipasi pemilih terjadi pada Pilkada tahun 2018. Dimana pada Pilkada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,70% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada 2018 yaitu 64,05%.

B. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Saat Pilkada.

1) Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Langkah pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Padang adalah mempersiapkan *Master Plan* melalui rapat-rapat yang ada di KPU Kota Padang untuk menentukan program yang akan dilaksanakan..

2) Komunikasi dengan pihak terkait

Keterlibatan berbagai elemen dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Padang ini adalah bentuk dari konsep komunikasi politik yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo mengartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3) Mengefektifkan Kegiatan Rumah Pintar Pemilu

Dalam meningkatkan partisipasi ini KPU Kota Padang membuat program yang bernama pendidikan memilih/Pendidikan Demokrasi. Program selanjutnya yang

dibuat oleh KPU Kota Padang untuk memberikan edukasi mengenai Pemilu adalah Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu adalah program kegiatan KPU Kota Padang dalam menanamkan pentingnya berdemokrasi dan menggunakan hak pilihnya mencakup semua segmen yang ada di masyarakat agar masyarakat tersebut sadar akan nilai-nilai demokrasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih di kota padang pada pilkada tahun 2018.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada KPU Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, Dwi. (2018). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No 2.
- Rinjani, Rahmad. (2014). Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 , Nomor 4
- Satma, N., & Putri, N. E. (2019). *Strategi Komunikasi Kpu Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Kada Tahun 2018*. 191–198.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47. www.publikasi.unitri.ac.id
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum